

**PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE MENURUT  
PERATURAN MENTERI PEKERJA UMUM NOMOR 12  
TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM  
DRAINASE PERKOTAAN**

**(Studi Kasus Drainase Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**RAGIL CAESAR ARIANDA**

**NIM. 180106014**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE MENURUT  
PERATURAN MENTERI PEKERJA UMUM NOMOR 12  
TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM  
DRAINASE PERKOTAAN**

**(Studi Kasus Drainase Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**RAGIL CAESAR ARIANDA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
NIM 180106014

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Khairani, M.Ag.**

NIP.197312242000032001

Pembimbing II



**Iskandar, SH, MH.**

NIP.197207082005041001

**PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE MENURUT PERATURAN  
MENTERI PEKERJA UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN  
(Studi Kasus Drainase Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana1 (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: 20 Maret 2025 M  
Kamis, 20 Ramadhan 1446 H

di Darussalam, banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
NIP.197312242000032001

Sekretaris,

Iskandar, S.H., M.H  
NIP.197208082005041001

Penguji I,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
NIP.197804212014111001

Penguji II,

Riza Afnan Mustaqim, S.H.I., M.H  
NIP.199310142019031000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzaman, M.Sh  
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ragil Caesar Arianda  
NIM : 180106014  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Maret 2025

Yang menyatakan,

  
  
Ragil Caesar Arianda

NIM. 180106014

## ABSTRAK

Nama : Ragil Caesar Arianda  
NIM : 180106014  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Pengelolaan Sistem Drainase Menurut Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)  
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag.  
Pembimbing II : Iskandar, SH, MH.

Judul skripsi ini adalah “Pengelolaan Sistem Drainase Menurut Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)”. Adapun permasalahannya bahwa Di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh terdapat bangunan drainase yang menurut peneliti masih kurang efektif dalam mengaliri air terutama disaat musim hujan, sampai saat ini, banyak warga sekitar Desa Lambaro Skep masih mengeluh akan drainase tersebut setelah sebelumnya proses pembuatan drainase tersebut membutuhkan waktu yang untuk menyelesaikannya sehingga mengganggu akses transportasi warga sekitar dan sekarang setelah drainase tersebut siap, fungsi dari drainase tersebut kurang maksimal. kemudian yang menjadi rumusan masalahnya, pertama, Bagaimanakah tanggapan masyarakat serta apa yang menjadi kendala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Banda Aceh dalam proses pembuatan drainase di Kecamatan Kuta Alam, kedua, Bagaimanakah tinjauan hukum Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Penelitian yang digunakan ialah yuridis-empiris, Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atas suatu fenomena, dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui yang berhubungan dengan keadaan tertentu. Adapun hasil penelitian, Kinerja saluran drainase di Kelurahan Keuramat masih belum optimal karena faktor teknis seperti penyempitan gorong-gorong dan penggunaan saluran sebagai jalur pipa minum, serta faktor sosial seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh wawasan dan kepercayaan mereka terhadap drainase, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase untuk meningkatkan kinerja saluran drainase.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula salawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Tindak Pengelolaan Sistem Drainase Menurut Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Iskandar S.H, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.
2. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari“ah dan Hukum, dan seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

3. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Ramadhan dan almarhumah Ibunda Cut Azawiyah, yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. dan terimakasih kepada adik-adik yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa.
4. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi serta dukungan dari teman dekat dan teman-teman prodi ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Hanya do'a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam berbagai bidang ilmu.

Banda Aceh, Jum'at 14 Maret 2025

Penulis,

AR - RANIRY

**Ragil Caesar Arianda**

NIM. 180106014

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan  
K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

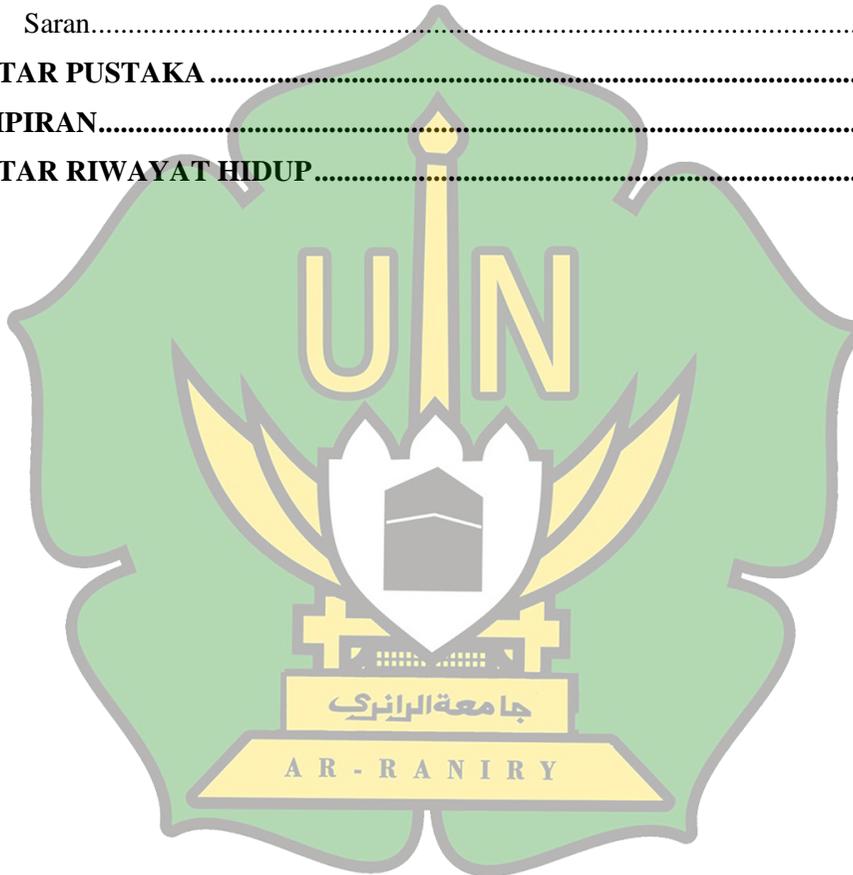
#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB SATU</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA</b> .....	<b>17</b>
<b>PENGELOLAAN DRAINASE PERKOTAAN</b> .....	<b>17</b>
A. Pengertian Drainase.....	17
B. Sejarah Drainase Perkotaan .....	18
C. Jenis-Jenis Drainase Perkotaan.....	21
D. Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan .....	23
E. Konsep Regulasi Hukum Drainase .....	29
F. Pelaksanaan Sistem Drainase Perkotaan Menurut Hukum Islam.....	30
<b>BAB TIGA</b> .....	<b>33</b>
<b>SISTEM PENGELOLAAN DRAINASE PERKOTAAN MENURUT PERATURAN MENTERI PEKERJA UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014</b> .....	<b>33</b>
A. Profil Dinas Pekerja Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh .	33
B. Kendala Proses Pembuatan Drainase Di Kecamatan Kuta Alam Oleh Dinas Pekerja Umum Dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.....	34

C. Hak-Hak Masyarakat Yang Tidak Terpenuhi Akibat Drainase Tidak Berjalan Dengan Efektif .....	36
D. Tanggapan Masyarakat Kecamatan Kuta Alam Terkait Fungsi Drainase Yang Tidak Efektif .....	36
<b>BAB EMPAT .....</b>	<b>39</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran.....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>43</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>45</b>



# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Aceh, sehingga perlu diperhatikan terkait lingkungan hidup karena banyaknya penduduk yang berdomisili di Kota Banda Aceh. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup>

Salah satu sektor lingkungan hidup yang harus diperhatikan ialah drainase karena merupakan salah satu fasilitas dasar yang diperlukan untuk kebutuhan masyarakat. Fungsi dari suatu drainase tersebut ialah mengalirkan air hujan dan membuat siklus air diperkotaan menjadi lancar.

Drainase berasal dari bahasa Inggris yaitu *Drainage* yang berarti sarana pembuangan kelebihan air atau limbah. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, drainase memiliki arti pengatutan atau penyaluran air. Dalam ilmu teknik sipil, drainase diartikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi genangan air pada suatu kawasan sehingga kawasan tersebut bias berfungsi dengan semestinya. Genangan air tersebut bias berasal dari air hujan atau rembesan maupun kelebihan air irigasi. Solusi pembuangan air tersebut bisa menggunakan saluran air didalam tanah maupun saluran air dipermukaan tanah.<sup>2</sup>

Drainase permukaan merupakan drainase yang terletak di atas permukaan tanah dan digunakan untuk mengalirkan air limpasan dan genangan air dipermukaan tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan drainase bawah tanah

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

<sup>2</sup> Erna Tri Asmorowati, Anita Rahmawati, Diah Sarasanty, Aptu Andy Kurniawan, M. Andik Rudiayanto, Edna Nadya, Meriana Wahyu Nugroho, Findia, *Drainase Perkotaan* (Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, Cetakan Pertama : Oktober 2021), hlm.1.

ialah drainase yang digunakan untuk mengalirkan air limpasan dari permukaan tanah melalui jalur bawah permukaan tanah yang menggunakan media pipa air.

Sistem jaringan drainase disuatu kawasan sudah semestinya dirancang untuk menampung kapasitas air yang normal, terutama disaat musim hujan. Dalam artian kata drainase tersebut sudah diperhitungkan dapat menampung kapasitas air, sehingga dikawasan tersebut tidak tercipta genangan air atau bahkan banjir. Jika kapasitas drainase menurun dikarenakan oleh berbagai sebab maka kapasitas yang normal tersebut juga tidak akan dapat menampungnya. Bebebarap faktor penyebab menurunnya kapasitas system drainase antara lain yaitu banyak terdapat endapan sedimen, terjadi kerusakan fisik drainase, adanya bangunan lain atas drainase.<sup>3</sup>

Secara umum operasi pemeliharaan drainase perkotaan dilaksanakan berdasarkan :<sup>4</sup>

1. Operasi dan pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi system drainase perkotaan dengan prinsip aman dan bersih.
2. Operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
3. Dalam hal operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan lokal itu menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
4. Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan dikawasan pemukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan itu menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>3</sup> Suripin, *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*, (Yogyakarta, Andi Offset:2003), hlm.7.

<sup>4</sup> Humairo Saidah, Nur Khaerat Nur, Parea Rusan Rangan, Muhammad Ikhsan Mukrim, Tamrin, Miswar Tumpu, Abd.Rakhim Nanda, Mardewi Jamal, Amrullah Msarsinda, Fendi Daud Sindagamanik, *Drainase Perkotaan* ( Medan, Yayasan Kita menulis, 2021 ), hlm 29

5. Pelaku operasi dan pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Sebagaimana dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyatakan bahwa: <sup>5</sup>

1. Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi dan prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan psarana drainase.
2. Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
3. Kegiatan pemeliharaan meliputi:
  - a. Pemeliharaan rutin;
  - b. Pemeliharaan berkala;
  - c. Rehabilitasi; dan
  - d. Pemeliharaan khusus.
4. Pemeliharaan rutin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan: pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sendimen dan saluran, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
5. Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan: penggelontoran, pengerukan sendimen saluran/kolam/gorong-gorong/syphon/kolam tendon/ kolam retensi, dan pemeliharaan *mechaninchal electrical*.

Desa Lambaro Skep merupakan salah satu desa di kecamatan Kuta Alam di Kota Banda Aceh. Di desa tersebut terdapat bangunan drainase yang menurut peneliti masih kurang efektif dalam mengaliri air terutama disaat musim hujan.

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan*.

Masih sampai saat ini, banyak warga sekitar Desa Lambaro Skep masih mengeluh akan drainase tersebut setelah sebelumnya proses pembuatan drainase tersebut membutuhkan waktu yang untuk menyelesaikannya sehingga mengganggu akses transportasi warga sekitar dan sekarang setelah drainase tersebut siap, fungsi dari drainase tersebut kurang maksimal.

Begitu juga dengan kinerja sistem drainase di gampong keuramat dan gampong laksana juga sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Kuta Alam yang belum berfungsi secara optimal, maka diperlukan redesign dan rehabilitasi saluran dengan cara memperhatikan kedalaman air tanah, elevasi muka air saluran dan elevasi sungai agar kelestarian air tanah dapat terjaga; dan, pengelolaan sistem drainase di kawasan penelitian yang belum maksimal, perlu dilakukan evaluasi pengelolaan drainase dengan manajemen perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi dengan melibatkan masyarakat, sehingga tercipta partisipasi dalam memelihara dan mengelola drainase di wilayah tempat tinggalnya.<sup>6</sup> Begitu juga di jalan Teuku Dibrang Kecamatan Kuta Alam yang merupakan pemukiman yang terletak di lingkungan Gampong Lampulo. Pada daerah ini sering terjadi genangan air. Penyebab dari terjadinya genangan ini karena kondisi kapasitas eksisting drainase sudah berkurang akibat sedimen, ditutupi dengan tanah dan juga banyak terdapat sampah di dalam drainase.<sup>7</sup>

Dampak yang dapat ditimbulkan ketika drainase tersebut kurang berfungsi maka ketika musim hujan akan menyebabkan banjir dan membuat daerah tersebut tergenang air sehingga lingkungan disekitar menjadi kurang sehat dan

---

<sup>6</sup> Yuswar, *Evaluasi Pengelolaan Pemeliharaan Drainase Kota Banda Aceh Secara Terpadu (Studi Kasus Gampong Keuramat dan Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh)*, Program Studi Megister Teknik Sipil, Universitas Syiahkuala, Banda Aceh, 2015.

<sup>7</sup> Ziana, Amir Fauzi, Marwan, Kertam Batu Rukmana, *Kinerja Saluran Drainase Di Jalan Teuku Dibrang Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh*, Vol.8, Nomor.1, Mei 2019, hlm.39.

menjadi tempat populasi nyamuk. Sebagaimana lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia.<sup>8</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: <sup>9</sup>

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kesehatan, keselamatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan di muka bumi, termasuk mengenai bagaimana manusia menjaga kebersihan lingkungan. Dalam sumber ajaran islam yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah diterangkan bagaimana ajaran Islam menyoroti masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa anjuran-anjuran untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan bukanlah hal baru dalam Islam, karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya, oleh sebab itu menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri. Kebersihan yaitu bebas dari kotoran atau keadaan yang menurut akal dan pengetahuan manusia dianggap tidak mengandung noda atau kotoran. Ahmad Syauqi al-Fanjari

<sup>8</sup> Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>9</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

mendefinisikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai kegiatan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit dengan cara menjaga kebersihan lingkungan.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengelolaan Sistem Di Tinjau Menurut Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tanggapan masyarakat serta apa yang menjadi kendala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Banda Aceh dalam proses pembuatan drainase di Kecamatan Kuta Alam ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk tanggapan masyarakat serta apa yang menjadi kendala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Banda Aceh dalam proses pembuatan drainase di Kecamatan Kuta Alam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

### **D. Penjelasan Istilah**

#### 1. Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *sustema* yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energy

---

<sup>10</sup> Ahmad Syauqi Al-Fanjari, Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 9.

untuk mencapai suatu tujuan.<sup>11</sup> Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan.<sup>12</sup>

Istilah sistem merupakan kumpulan yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur sehingga membentuk suatu kesatuan yang melakukan suatu fungsi untuk mencapai suatu tujuan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>14</sup>

## 2. Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang

Merupakan salah satu Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

## 3. Drainase

Drainase atau pengatusan adalah pembuangan masa air secara alami atau buatan dari permukaan tanah atau bawah permukaan dari suatu tempat, pembuangan ini dapat dilakukan dengan cara menguras, membuang mengalirkan atau mengalihkan air.<sup>15</sup>

Drainase juga merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menjadi solusi disaat kelebihan air di atas permukaan tanah yang dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi secara terus menerus. Secara umum drainase dapat diartikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi air yang berlebih, baik berasal dari rembesan, air hujan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan sehingga fungsi lahan tidak terganggu.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> <https://elib.unikom.ac.id>, di akses Hari Kamis tanggal 24 Bulan November Tahun 2022.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang *Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian*

<sup>13</sup> Elisabet Yunaeti Anggraeni dan Rita Irviani, *Pengantar Sistem Informasi*, (Aceh, CV.ANDI OFFSET, 2017), hlm.1.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>15</sup> Dr.Ir.Suripin, M.Eng, *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*, (Yogyakarta, 2004), hlm.13.

<sup>16</sup> Andung Yuanianta, *Sistem Drainase Jalan Raya Yang Berkelanjutan* (Makassar, CV.Tohar media, 2022), hlm.11.

#### 4. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>17</sup>

#### E. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Try Ayu Anggraini, mahasiswi Fakultas Sain dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul "*Evaluasi Sistem Drainase Dalam Upaya Penanggulangan Banjir Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*". Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kondisi drainase di kelurahan Lumpue yaitu buruk disebabkan oleh sedimentasi dan buangan air limbah yang sangat tinggi sehingga menyebabkan drainase mengalami kedangkalan dan juga sistem drainase tidak memadai. Arah sistem drainase dibuat dengan berkontruksi beton atau pengerasan secara keseluruhan dan strategi sinergitas masyarakat dan pemerintah, dimana masyarakat mendorong pemerintah untuk memperbaiki rencana sistem drainase menjadi lebih baik untuk menanggulangi kemungkinan banjir dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan program pemeberdayaan masyarakat dalam mengontrol terhadap lingkungan khususnya untuk drainase lingkungan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

<sup>18</sup> Try Ayu Anggraini, mahasiswi, *Evaluasi Sistem Drainase Dalam Upaya Penanggulangan Banjir Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*, Fakultas Sain dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Salsabila, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Suska Riau, yang berjudul *“Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)”*. Dalam penelitian tersebut membuah hasil pengelolaan sistem drainasi oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru masih belum optimal karena masih banyak terdapat tumpukan sampah serta endapan sedimen pada sistem drainase. Selanjutnya factor penghambat sistem pengelolaan drainase oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataann Ruang Kota Pekanbaru ialah minimnya anggaran untuk pengelolaan sistem drainase, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta ditambah laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah sehingga berdampak pada pembangunan suatu tempat.<sup>19</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Widhita Satya Herlambang, mahasiwa Fakultas Teknil Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Nasional Malang yang berjudul *“Evaluasi Kinerja Sistem Drainase Di Wilayah Jombang”*. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pada sistem drainase dan bangunan pelengkap saluran drainase banyak permasalahan yang terjadi. Permasalahan ini terjadi akibat adanya peningkatan debit pada saluran drainase. Penyebab lainnya karena adanya peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk, amblesan tanah, penyempitan dan

---

<sup>19</sup> Ulfa Salsabila, *Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Suska, Riau, 2021.

pendangkalan saluran, serta sampah disaluran drainase. Sudah seharusnya masyarakat dan pemerintah setempat menyadari pentingnya fungsi saluran drainase, khususnya drainase perkotaan serta permasalahan yang terjadi di perkotaan.<sup>20</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Farida Amalia, mahasiswi Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang berjudul “*Peran Pemerintah Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Menanggulangi Banjir Di Perumahan Kembar Lestari 2 Kota Jambi*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa ada 3 faktor penyebab terjadinya banjir yaitu: *Pertama*, factor lingkungan yang memprihatinkan karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah kedalam drainase. *Kedua*, pembangunan drainasenya yang masih belum memenuhi standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014. *Ketiga*, Peran Pemerintah yang melakukan pembersihan drainase hanya dua kali dalam satu tahun.<sup>21</sup>
5. Skripsi yang ditulis oleh Aidilia Tri Ananda Nasution, mahasiswi Fakultas Teknik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Medan, yang berjudul “*Evaluasi Sistem Drainase Untuk Menanggulangi Banjir (Studi Kasus Jalan Dr.Mansyur Depan Kampus USU Fakultas Kedokteran)*”. Dalam penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwa banjir dan genangan di daerah perkotaan dan daerah padat penduduk merupakan masalah konvensional yang belum terselesaikan. Penyebab terjadinya banjir selain drainase yang tidak mampu mengalirkan air hujan secara

---

<sup>20</sup> Widhita Satya Herlambang, *Evaluasi Kinerja Sistem Drainase Di Wilayah Jombang*, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Malang, 2015.

<sup>21</sup> Farida Amalia, mahasiswi, *Peran Pemerintah Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Menanggulangi Banjir Di Perumahan Kembar Lestari 2 Kota Jambi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

maksimal juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat drainase sehingga drainase tersebut jadi kotor.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara tertentu dalam menggali, menganalisis data suatu penelitian. Penelitian sendiri yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakuka secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>23</sup> Adapun, metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atas suatu fenomena, dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui yang berhubungan dengan keadaan tertentu.<sup>24</sup> Penggunaan metode tersebut dalam skripsi ini bertujuan untuk bisa menggambarkan keadaan subjek penelitian dalam hubungannya dengan pengelolaan sistem drainase perkotaan oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dengan lokasi drainasenya itu di Kecamatan Kuta Alam yaitu di beberapa desa : Desa Lambaro Skep, Kampung Mulia Lampulo dan beberapa desa lainnya yang ada di kecamatan Kuta Alam.

### 1. Pendekatan Penelitian

- a. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual) ialah penelitian hukum dengan pendekatan konseptual iniberanjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang di ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Aidilia Tri Ananda Nasution, *Evaluasi Sistem Drainase Untuk Menanggulangi Banjir (Studi Kasus Jalan Dr.Mansyur Depan Kampus USU Fakultas Kedokteran)*, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sumatera, Medan, 2022.

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.3

<sup>25</sup> [https:// katadata.co.id](https://katadata.co.id), di akses tanggal 5 April, pukul 00:14 Wib.

- b. *Case Approach* (Pendekatan Kasus) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>26</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dala penelitian ini juga menggunakan metode penelitian *Purposive Sampling* yaitu dimana ada kejadian maka disitulah di ambil lokasi penelitiannya.

Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.<sup>27</sup>

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

---

<sup>26</sup> *Ibid*, pukul 00:25 Wib

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53-54.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan di drainase Kecamatan Kuta Alam, melakukan wawancara terhadap masyarakat setempat, yang di gunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

1) Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan<sup>28</sup>. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dimana dalam penelitian ini data dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang pengelolaan sistem drainasi perkotaan oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh yaitu Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Drainase Perkotaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141

analisa dan pemahaman yang lebih mendalam<sup>29</sup>. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas :

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai sistem pengelolaan drainase perkotaan;
- 3) Hasil penelitian;
- 4) Pendapat ahli yang kompeten;
- 5) Data dari Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

### 4) Teknik Pengumpulan Data

#### a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>30</sup> Untuk kelengkapan data yang dibutuhkan, maka peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat sekitar yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

#### b) Dokumentasi

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm.72

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mengambil data melalui dokumentasi yang berkenaan dengan penelitian ini.

#### 5) Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang diinginkan dan dibutuhkan terkumpul semua, kemudian dilakukan pengolahan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang kan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun teknik analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan dilapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

#### 6) Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasam teoritis yang membahas tentang tinjauan Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh yang meliputi, peran, fungsi dan tujuan, standarisasi drainase menurut Peraturan Menteri Pekerja

Umum Nomor 12 Tahun 2014, dampak yang akan diakibatkan oleh drainase yang rusak serta pengaruh lingkungan yang tercemar ke dalam kehidupan masyarakat sekitar.

Bab Tiga merupakan inti dari pembahasan yang menjelaskan Profil Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, sistem pengelolaan drainase oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, tanggap masyarakat sekitar terkait drainase di Desa Lambaro Skep, serta solusi kedepannya terkait drainase di Kecamatan Kuta Alam menurut Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Drainase Perkotaan.

Bab keempat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan penelitian di dalam skripsi ini.

